

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dengan berbagai daerah dan kepulauan yang tersebar dalam 34 provinsi, tentu memiliki peluang dan hambatannya masing-masing. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi yang tepat dari pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang merata. Salah satu masalah yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tidak dimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang mapan, tingkat pendidikan rendah dan distribusi pendapatn yang tidak merata.

Kemiskinan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang pasti dan tidak terbatas ruang dan waktu. Yang berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, papan dan sandang. Kemiskinan absolut biasa diterjemahkan dengan keadaan finansial seseorang. Sedangkan kemiskinan relatif adalah sebuah ukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan dan distribusi pengeluaran sesorang. Kemiskinan relatif biasa diukur dengan perbandingan antar daerah. Kemiskinan absolut adalah contoh kemiskinan yang terjadi pada daerah Jawa dan Ibukota. Dan kemiskinan relatif

adalah ukuran kemiskinan yang terjadi pada daerah Indonesia timur dan sekitarnya.

Tabel 1.1 10
Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi di Indonesia

NO	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Presentase Penduduk miskin (%)
1	Papua	859,15	28,17
2	Papua Barat	225,37	25,82
3	Nusa Tenggara Timur	1159,84	22,61
4	Maluku	328,41	19,51
5	Gorontalo	206,85	18,32
6	Bengkulu	334,07	17,88
7	Nusa Tenggara Barat	823,89	17,10
8	Aceh	851,58	17,08
9	D.I Yogyakarta	550,22	14,91
10	Sulawesi Tengah	421,63	14,66

*Data diolah dari laporan Sosial Ekonomi BPS November 2015

Dari tabel diatas, kita dapat mengetahui bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi termiskin ke-3 di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan luas sekitar 48718,10 km² yang terletak di Pulau Nusa Tenggara dan ber-ibukota di Kupang. Dari total populasi penduduk sekitar 4.683.827 jiwa yang tersebar dalam 21 Kabupaten dan 1 Kota, angka di atas menunjukkan bahwa 22,61% di antaranya masuk dalam kategori penduduk miskin. Kemiskinan yang terjadi di NTT disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya alam yang tidak mampu dikelola dengan baik, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kesenjangan alokasi pembangunan yang hanya terfokus pada beberapa daerah seperti Ibukota provinsi saja. Selama ini sumber daya alam masih dikelola

secara tradisional oleh masyarakat setempat karena mahal biaya produksi jika diproduksi secara modern. Selain itu, pelayanan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya) juga masih kurang mendapat perhatian. Krisis multidimensional dan kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak terhadap rakyat miskin juga menyebabkan Nusa Tenggara Timur semakin sulit untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Oleh karena itu, provinsi Nusa Tenggara Timur sangat membutuhkan perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersama memperbaiki pertumbuhan ekonomi NTT pada khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya.

Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pancasila sila ke-5 menegaskan bahwa adanya suatu keadilan ataupun pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, sangatlah bertentangan dengan Pancasila apabila keadilan sosial tersebut belum didapatkan oleh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan otonomi daerah pada 1 Januari 2001. Otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang memberikan wewenang penuh pada Pemerintah suatu daerah untuk mengelola ataupun mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan Negara yang berlaku. Kebijakan otonomi daerah ini lahir akibat adanya permasalahan kesenjangan pembangunan antara Daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa dengan Daerah-daerah yang berada di Pulau-pulau lainnya. Otonomi daerah ini pun telah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, diharapkan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang ada secara adil agar tidak ada lagi kesenjangan antara Pulau Jawa dengan Pulau-pulau lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004. Namun, otonomi daerah ini hanya dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari elite

politik Nasional kepada elite politik Daerah, sehingga kebijakan ini digunakan secara sewenang-wenang oleh para elite politik tersebut. Padahal Otonomi Daerah menghendaki adanya peran masyarakat, yakni menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pengambilan keputusan, bukan menjadikan masyarakat sebagai obyek dari suatu kebijakan yang diambil oleh elite politik.

Salah satu bentuk program dari otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Daerah selama satu tahun (1 Januari – 31 Desember) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Di mana APBD ini terdiri atas : (1) Anggaran pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan lain-lain yang sah; (2) Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan, seperti halnya biaya tugas ke luar daerah maupun biaya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jika suatu kegiatan Daerah tidak tercantum dalam APBD, maka kegiatan tersebut tidak akan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. APBD ini sangat penting digunakan untuk menjadi tolak ukur penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. APBD harus diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan langkah menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, pemerataan pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, maupun keadilan dan kepatutan pendapatan masyarakat.

Setiap pemerintah daerah pada hakikatnya mencita-citakan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Pencapaian kesejahteraan masyarakat ini dapat diupayakan melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Dengan masyarakat yang

sejahtera diharapkan tidak lagi terbelenggu dalam kondisi kemiskinan (Sulistiyani, 2004: 31), kelaparan dan kebodohan. Namun semua belenggu tersebut tidak terlepas dari keberpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat. Keberpihakan APBD terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Anggaran yang mempunyai keberpihakan kepada masyarakat agar terbebas dari belenggu kemiskinan secara global adalah hasil kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs). Pemerintah Indonesia ikut hadir dan menandatangani kesepakatan Millenium Development Goals (MGDs) pada bulan September tahun 2000 di New York. Penandatanganan kesepakatan ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia termasuk Inonesia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untu dapat menyelesaikan pendidikan dasar, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, menguramgi kematian anak balita hingga 2/3 dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak mempunyai akses memperoleh air bersih pada tahun 2015.

Menurut Saputra (2011: 26), tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat juga dari pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Jika pendapatan dan pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat kesejahteraan penduduk juga meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu satu perioide. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 PDRB
Atas Dasar Harga Konstant tahun 2010 – 2015

Provinsi	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NTT	43.846,61	46.334,13	48.863,19	51.505,19	54.106,27	56.820,10

Sumber : BPS NTT

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Timur

Wilayah (Provinsi)	Jumlah penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NTT	1 021.60	986.50	1 000.29	1 006.88	991.88	1 160.53

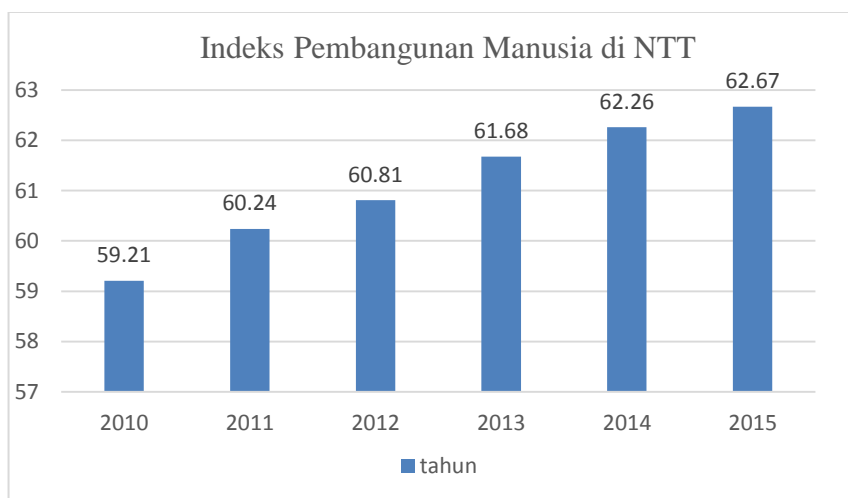
Sumber : BPS NTT

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan di provinsi NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTT juga terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diringi oleh penurunan jumlah kemiskinan secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kemiskinan di NTT pada tahun 2012 yang kembali mengalami peningkatan menjadi 1.000.29 jiwa. Dan terus meningkat hingga tahun 2015 sebanyak 1.160.53 jiwa.

Selain PDRB, hal penting dalam mengukur keberhasilan suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam IPM kita dapat mengetahui bagaimana penduduk

dapat mengakes hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU).

Gambar 1.1
Indeks pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber : BPS NTT

Pada tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa IPM di NTT terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Namun, Provinsi NTT masih berada pada peringkat ke 32 dari 34 Provinsi di Indonesia. Yang artinya masih sangat jauh dari kata baik.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, hal tersebutlah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Belanja

Daerah, PDRB dan IPM terhadap Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2010 – 2015. (studi kasus Kota dan Kabupaten di NTT)”

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Realisasi Belanja Daerah, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah kemiskinan di Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2010-2015.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap jumlah kemiskinan di Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun 2010 – 2015?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah kemiskinan di Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun 2010 – 2015?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusi terhadap jumlah kemiskinan di Kota dan kabupaten di NTT pada tahun 2010 – 2015?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi belanja Daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Kota dan kabupaten di NTT pada tahun 2010 – 2015
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun 2010 – 2015

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di kota dan kabupaten di NTT pada tahun 2010 – 2015

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan di bidang teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu mengenai akuntansi sektor publik dan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan dibidang ilmu ekonomi pembangunan. Dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan di bidang praktik

Memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam menyusun anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Dan sebagai bahan dalam mengambil kebijakan mengenai pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat.